

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Busroh, Abu Daud, 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- DH, Basu Sawstha, 1985, *Asas-asas Manajemen Modern*, Liberty, Yogyakarta
- Hardjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamzah, Abu, 2014, *Ayo Bisnis Umrah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 124-125
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Husain, Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2009, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- , 2007, *Sistem Pengawasan Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty Yogyakarta
- Poerwadarminta, W.J.S, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta
- Situmorang, Viktor M. dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Apaatur Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, UI Press, Jakarta
- Sudarto, 2018, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Deepublish, Yogyakarta,
- Sugandha, Daan, 1989, *Pengantar Administasi Indonesia*, Intermedia, Jakarta
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Utrecht, E., 1994, *Pengaturan Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya

Undang-undang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5345)

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898)

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 760);

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji tahun 1435 H/ 2014 M

Skripsi

- Pipit Deviyanti. 2015. Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Pada Penyelenggaraan Haji Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta;
- Furqon Mukminin. 2015. Manajemen Pelayanan Bio Perjalanan Haji dan Umrah (Study Kasus di Sultan Agung Tour & Tavel Semarang). *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang.

Web

- Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Kementerian Agama diminta Awasi travel Umrah”, <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/21163971/kementerian-agama-diminta-awasi-travel-umrah>, diakses pada 13 Februari 2018.
- Arkhelas W, “Bos First Travel Dijerat Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang”, <https://nasional.tempo.co/read/898883/bos-first-travel-dijerat-pasal-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada 16 November 2017;
- Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut Indonesia”, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses pada 21 Desember 2017.
- Dinas Jarot Bayu, “Ombudsman Ungkap Masalah Tata Kelola Penyelenggaraan Umrah”, <https://katadata.co.id/berita/2017/10/04/ombudsman-ungkap-masalah-tata-kelola-penyelenggaraan-umrah>, diakses pada 21 November 2017.
- Irwandi Arsyad, VIVA.co.id, “YLKI Ungkap Daftar Biro Umrah Bermasalah” <http://www.viva.co.id/berita/bisnis/940580-ylki-ungkap-daftar-biro-umrah-bermasalah>, diakses pada 18 September 2017;
- Kebumen ekspres, *Perketat Pengawasan Umrah di Bandara*, WWW.Kebumenekspres.com, diakses pada 2 Februari 2018.
- Khoiron, “Sejak 2015, Kemenag Cabut Izin 13 Travel Umrah”, <http://kemenag.go.id>, diakses pada 12 Maret 2018
- Okezone.com, “Kemenag DIY Tutup 20 Biro Umrah Bodong”, <https://googleweblight.com>, diakses pada 12 Februari 2018